

GOOD GOVERNANCE, KEBIJAKAN PUBLIK, DAN DEMOKRASI LOKAL: STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

Moh Sa'diyin¹⁾, Sutopo²⁾

^{1,2)} Universitas Sunan Drajat Lamongan, Indonesia,

e-mail : muhammadsadiyin38@gmail.com¹⁾, sutopodrajat@gmail.com²⁾

Received: 17-03-2026

Revised: 15-05-2026

Accepted: 21-06-2025

Info Artikel

Abstract

Keywords:

Good Governance, Public Policy, Local Democracy, Public Participation, Lamongan Regency.

The implementation of good governance principles plays a crucial role in improving the quality of public policy and strengthening local democracy in the era of regional autonomy. Lamongan Regency, as one of the developing regions in East Java Province, has demonstrated various efforts to establish good governance through enhanced transparency, accountability, public participation, and innovation in public services. This study aims to analyze the implementation of good governance in the formulation and implementation of public policies and its implications for strengthening local democracy in Lamongan Regency. The research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through document analysis, observation, and examination of government policy documents and performance reports. The analysis was conducted using the perspectives of good governance, public policy, and local democracy. The findings indicate that the Lamongan Regency Government has implemented good governance principles through improved public service systems, information transparency, and community involvement in regional development planning. However, public participation in the policy-making process remains largely procedural and has not yet reached a substantive level. In addition, the influence of local political elites in policy formulation continues to pose challenges to broader public representation. The study concludes that the implementation of good governance has positively contributed to improving public policy quality and strengthening local democracy in Lamongan Regency. Nevertheless, greater efforts are needed to strengthen public participation mechanisms, enhance community capacity, and optimize transparency and accountability to foster a more inclusive, participatory, and sustainable local democracy.

Abstrak

Penerapan prinsip good governance menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik dan memperkuat demokrasi lokal di era otonomi daerah. Kabupaten Lamongan sebagai salah satu daerah yang berkembang di Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan berbagai upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta inovasi pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi good governance dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik serta implikasinya terhadap penguatan demokrasi lokal di Kabupaten Lamongan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi dokumentasi, observasi, dan kajian terhadap berbagai kebijakan serta laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan. Analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif good governance, kebijakan publik, dan demokrasi lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan telah mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance melalui

Kata Kunci:

Good Governance, Kebijakan Publik, Demokrasi Lokal, Partisipasi Masyarakat, Kabupaten Lamongan.

penguatan sistem pelayanan publik, keterbukaan informasi, dan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan masih cenderung bersifat prosedural dan belum sepenuhnya mencapai tingkat partisipasi substantif. Selain itu, masih ditemukan pengaruh elite politik lokal dalam proses formulasi kebijakan yang berpotensi membatasi representasi kepentingan masyarakat secara lebih luas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi good governance berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas kebijakan publik dan penguatan demokrasi lokal di Kabupaten Lamongan. Akan tetapi, diperlukan penguatan mekanisme partisipasi publik, peningkatan kapasitas masyarakat, serta optimalisasi transparansi dan akuntabilitas agar demokrasi lokal dapat berkembang secara lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah pascareformasi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengelola urusan pemerintahan dan pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks tersebut, penerapan prinsip good governance menjadi salah satu indikator penting keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.¹ Konsep good governance menekankan adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, serta supremasi hukum dalam proses pengambilan dan pelaksanaan kebijakan publik.²

Kebijakan publik merupakan instrumen utama pemerintah dalam menjawab kebutuhan dan permasalahan masyarakat. Kualitas kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam merumuskan program, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan.³ Oleh karena itu, hubungan antara good governance, kebijakan publik, dan demokrasi lokal menjadi sangat erat. Demokrasi lokal memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan arah pembangunan daerah, sementara good governance memastikan bahwa partisipasi tersebut dikelola secara transparan dan akuntabel.⁴

Kabupaten Lamongan sebagai salah satu daerah yang berkembang di Provinsi Jawa Timur menunjukkan berbagai inovasi dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Lamongan telah mengembangkan sejumlah program pelayanan publik berbasis teknologi informasi, sistem perencanaan pembangunan partisipatif, serta berbagai inovasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan tersebut menjadikan Lamongan sebagai salah

¹ Yasin, Andi Sri Yusnani, et al. "Analisis Kebijakan Publik Dan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance." *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi* 17.2 (2024): 410-418.

² Ibid

³ Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *Jurnal ilmu politik dan komunikasi*, 6(1).

⁴ Firdausijah, R. T., & Priatna, A. (2020). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(2), 58-63.

satu daerah yang sering memperoleh penghargaan dalam bidang pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.⁵

Meskipun demikian, tantangan dalam mewujudkan good governance masih tetap ada. Partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan belum selalu berjalan optimal. Selain itu, masih ditemukan kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat, keterbatasan kapasitas masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan, serta adanya potensi dominasi elite lokal dalam proses pengambilan keputusan.⁶ Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada kinerja birokrasi, tetapi juga pada kualitas demokrasi lokal yang berkembang di masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip good governance dalam kebijakan publik Pemerintah Kabupaten Lamongan serta pengaruhnya terhadap penguatan demokrasi lokal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antara tata kelola pemerintahan yang baik, kualitas kebijakan publik, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan secara mendalam fenomena implementasi *good governance*⁸ dalam penyelenggaraan kebijakan publik dan kaitannya dengan demokrasi lokal di Kabupaten Lamongan. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparatur pemerintah daerah, anggota DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, serta perwakilan organisasi masyarakat sipil. Data sekunder diperoleh dari dokumen perencanaan pembangunan daerah, laporan kinerja pemerintah daerah, peraturan daerah, laporan pelayanan publik, serta berbagai publikasi ilmiah yang relevan.⁹

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.¹⁰ Untuk menjamin validitas

⁵ Sururi, A. (2019). Inovasi kebijakan organisasi sektor publik menuju terwujudnya good public policy governance. *Jurnal Good Governance*, 15(1).

⁶ Farhanuddin, A. F., Setia, A. A. P., & Jauza, D. (2021). Penerapan etika pelayanan publik dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 64-74.

⁷ Ibid

⁸ Sihotang, J. S. (2023). Good governance dalam pelayanan publik. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 1(2), 188-201.

⁹ Yin, R. K., & Mudzakir, M. D. (2019). Studi kasus desain & metode.

¹⁰ Sagena, U., Lawelai, H., & Dema, H. (2023). *Metode Penelitian Sub Rumpun Ilmu Politik (Teori & Referensi berbasis Studi Kasus)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

data, penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Analisis penelitian berfokus pada lima indikator utama *good governance*, yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan responsivitas pemerintah daerah dalam proses perumusan serta implementasi kebijakan publik.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Prinsip Good Governance di Kabupaten Lamongan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini terlihat dari pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*), keterbukaan informasi publik, serta pelaksanaan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (*Musrenbang*) yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Dari aspek transparansi, pemerintah daerah menyediakan akses informasi melalui situs resmi pemerintah, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya. Informasi mengenai program pembangunan, anggaran daerah, serta capaian kinerja pemerintah relatif mudah diakses oleh masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam membangun keterbukaan informasi publik.¹²

Pada aspek akuntabilitas, pemerintah daerah telah menerapkan sistem pelaporan kinerja yang mengacu pada prinsip manajemen pemerintahan modern. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diwajibkan menyusun laporan kinerja dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada publik maupun lembaga pengawas.¹³

Kebijakan publik pada tingkat daerah merupakan manifestasi dari kewenangan otonomi yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kebutuhan lokal. Dalam konteks Kabupaten Lamongan, implementasi kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari upaya pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan hasil analisis, Pemerintah Kabupaten Lamongan menunjukkan kecenderungan yang kuat untuk mengintegrasikan prinsip *good governance* dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan publik. Hal ini terlihat dari berbagai inovasi pelayanan publik,

¹¹ Marsh, D., & Stoker, G. (2019). *Teori dan metode dalam ilmu politik*. Nusamedia.

¹² Ogsala, N., Ma'ruf, M. F., Pradana, G. W., & Eprilianto, D. F. (2026). Analisis Penerapan Good Governance Melalui Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif Berbasis Komunitas Pada Pilkada 2024 Di Kabupaten Lamongan (Studi Kasus: Komunitas Disabilitas). *Publika*, 14(1), 165-178.

¹³ *ibid*

pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan, serta penguatan mekanisme partisipasi masyarakat melalui forum-forum perencanaan pembangunan.¹⁴

Dalam perspektif teori *good governance* yang dikemukakan oleh United Nations Development Programme (UNDP), terdapat beberapa prinsip utama yang menjadi indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan, yaitu partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, responsivitas,¹⁵ dan supremasi hukum. Jika dikaitkan dengan kondisi Kabupaten Lamongan, sebagian besar prinsip tersebut telah diupayakan dalam proses kebijakan publik. Akan tetapi, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius.¹⁶

Kebijakan Publik dan Partisipasi Masyarakat

Kebijakan publik yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Lamongan pada umumnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan penguatan sektor ekonomi lokal. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan diwujudkan melalui mekanisme Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Forum ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan.¹⁷

Namun demikian, penelitian menemukan bahwa partisipasi masyarakat masih cenderung bersifat prosedural. Tidak semua usulan masyarakat dapat diakomodasi dalam kebijakan daerah karena keterbatasan anggaran maupun pertimbangan teknokratis pemerintah. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat masih dipengaruhi oleh faktor pendidikan, akses informasi, dan kapasitas organisasi masyarakat sipil.¹⁸

Temuan ini sejalan dengan teori demokrasi partisipatif yang menyatakan bahwa kualitas partisipasi tidak hanya diukur dari keterlibatan formal masyarakat, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memengaruhi keputusan publik yang dihasilkan pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara *good governance*, kebijakan publik, dan demokrasi lokal di Kabupaten Lamongan. Ketiga aspek tersebut membentuk suatu sistem yang saling memengaruhi dan saling menguatkan.¹⁹

¹⁴ Susilo, J. H. (2016). *Pengelolaan alokasi dana desa (ADD) untuk mewujudkan good governance: Studi kasus pada Desa Banggle Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

¹⁵ Raharja, M. (2015). *Pengelolaan keuangan dan aset daerah (studi pada badan pengelolaan Keuangan dan aset daerah, kabupaten lamongan)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

¹⁶ Sholikin, A. (2021). Implementation of Green and Clean Policies in Environmental Governance Perspective in Lamongan Regency. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 18(1), 104-117.

¹⁷ Utomo, S. D. (2003). Partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan. dalam Indra J. Piliang, Dendi Ramdani, dan Agung Priyadi, *Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi*, Jakarta: Penerbit Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa.

¹⁸ Nelly, S. (2024). Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik. *Jurnal Sociopolitico*, 6(1), 86-94.

¹⁹ Lubis, S. (2017). Partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. *Demokrasi*, 6(1), 242733.

Prinsip *good governance* menyediakan kerangka normatif bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Kebijakan publik menjadi instrumen operasional yang digunakan pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah.²⁰ Sementara itu, demokrasi lokal berfungsi sebagai mekanisme legitimasi dan pengawasan yang memastikan bahwa kebijakan publik tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Analisis menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Namun demikian, kualitas demokrasi lokal masih menghadapi tantangan berupa partisipasi masyarakat yang belum substantif, ketimpangan akses terhadap proses kebijakan, serta pengaruh elite politik dalam pengambilan keputusan.²¹

Dengan demikian, agenda utama yang perlu diperkuat ke depan bukan hanya meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan, tetapi juga memperdalam demokrasi lokal melalui perluasan partisipasi masyarakat, peningkatan transparansi yang bermakna, dan penguatan mekanisme akuntabilitas publik. Langkah tersebut akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan sehingga tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal.²²

Good Governance sebagai Penguat Demokrasi Lokal

Penerapan prinsip *good governance* terbukti memberikan kontribusi terhadap penguatan demokrasi lokal di Kabupaten Lamongan. Transparansi informasi memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Akuntabilitas mendorong pejabat publik untuk bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil.²³ Sementara itu, partisipasi masyarakat menciptakan ruang dialog antara pemerintah dan warga. Dalam perspektif demokrasi lokal, hubungan antara pemerintah dan masyarakat menunjukkan pola yang semakin kolaboratif. Pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dalam proses pembangunan, melainkan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti organisasi masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media massa.²⁴

²⁰ Astuti, A. S. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN PROSTITUSI: Studi Kasus di Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. *The Republic: Journal of Constitutional Law*, 1(2), 63-76.

²¹ *ibid*

²² Magriasti, L. (2011). Arti penting partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik di daerah: analisis dengan teori Sistem David Easton.

²³ Ulum, S., & Dewi, S. A. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Gamplong. *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 14-24.

²⁴ Wahyuni, S., & Sudirman, R. (2026). Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik: Memperkuat Demokrasi dan Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah. *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora*, 4(4), 2196-2206.

Namun demikian, penelitian juga menemukan adanya beberapa hambatan dalam penguatan demokrasi lokal. Pertama, masih terdapat kesenjangan partisipasi antara kelompok masyarakat perkotaan dan pedesaan. Kedua, kapasitas masyarakat dalam memahami proses kebijakan publik masih terbatas.²⁵ Ketiga, dominasi elite politik lokal dalam beberapa proses pengambilan keputusan berpotensi mengurangi kualitas demokrasi substantif. Menurut perspektif governance, keberhasilan demokrasi lokal tidak hanya ditentukan oleh keberadaan mekanisme partisipatif, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menciptakan ruang partisipasi yang inklusif, setara, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan kelembagaan partisipatif menjadi kebutuhan penting dalam mendukung implementasi good governance di Kabupaten Lamongan.²⁶

Analisis Hubungan Good Governance, Kebijakan Publik, dan Demokrasi Lokal

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat hubungan yang saling memengaruhi antara good governance, kebijakan publik, dan demokrasi lokal. Penerapan prinsip good governance meningkatkan kualitas proses perumusan kebijakan publik melalui keterbukaan informasi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.²⁷ Kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat pada akhirnya memperkuat legitimasi pemerintah daerah. Di sisi lain, demokrasi lokal memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan sehingga tercipta mekanisme kontrol terhadap pemerintah. Dengan demikian, good governance berfungsi sebagai instrumen tata kelola, kebijakan publik sebagai produk pemerintahan, dan demokrasi lokal sebagai mekanisme legitimasi serta pengawasan publik.²⁸

Hubungan ketiga aspek tersebut membentuk suatu siklus yang saling memperkuat. Semakin baik penerapan good governance, semakin berkualitas kebijakan publik yang dihasilkan. Semakin berkualitas kebijakan publik, semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tingginya kepercayaan masyarakat pada akhirnya memperkuat demokrasi lokal dan stabilitas pemerintahan daerah. Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah masih adanya pengaruh elite politik lokal dalam proses formulasi kebijakan publik. Dalam praktik demokrasi

²⁵ Bintang, R., & Sa'diyin, M. (2026). PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA DESA DI DESA BULUBRANGSI KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH. *The Republic: Journal of Constitutional Law*, 4(1), 85-112.

²⁶ Irianto, H., Prasetyowati, T., & Miladiyah, R. (2020). PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PENYUSUNAN APBD DESA MERTANI KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN. *Intelektual: Jurnal Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 10(1), 98-109.

²⁷ Kasmawanto, Z. (2025). Dinamika Konflik Politik di Desa: Proses dan Dampaknya terhadap Tata Kelola Pemerintahan. *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Masyarakat*, 17(1), 240-253.

²⁸ Saputri, E. D. (2018). Analisis Pelayanan Publik Pemerintahan Desa Tlanak Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan. *JPAAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(1).

lokal, elite politik memiliki posisi strategis karena menguasai sumber daya politik, akses informasi, dan jaringan kekuasaan yang memengaruhi proses pengambilan keputusan.²⁹

Menurut teori elite yang dikemukakan oleh Gaetano Mosca dan Vilfredo Pareto, setiap sistem politik pada dasarnya akan dikuasai oleh kelompok kecil yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi keputusan publik. Fenomena ini juga dapat ditemukan dalam pemerintahan daerah, termasuk di Kabupaten Lamongan.³⁰ Meskipun mekanisme partisipasi masyarakat telah tersedia, tidak semua aspirasi masyarakat memiliki peluang yang sama untuk masuk ke dalam agenda kebijakan pemerintah. Aspirasi yang didukung oleh kelompok-kelompok yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan cenderung memperoleh prioritas lebih besar dibandingkan aspirasi masyarakat yang tidak memiliki akses politik yang memadai.³¹

Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam mewujudkan demokrasi lokal yang inklusif dan partisipatif. Jika tidak dikelola dengan baik, dominasi elite dapat mengarah pada praktik *elite capture*, yaitu situasi ketika kebijakan publik lebih banyak mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan partisipatif menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses kebijakan publik berlangsung secara terbuka dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menerapkan berbagai prinsip *good governance* melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan responsivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Implementasi prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam berbagai kebijakan publik yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah. Penerapan *good governance* berkontribusi positif terhadap penguatan demokrasi lokal melalui peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan dan pengawasan kebijakan publik. Meskipun demikian, kualitas partisipasi masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas masyarakat, kesenjangan akses informasi, dan pengaruh elite politik lokal dalam pengambilan keputusan.

Hubungan antara *good governance*, kebijakan publik, dan demokrasi lokal bersifat saling mendukung dan membentuk tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis. Oleh karena itu,

²⁹ Ibid

³⁰ Nugraha, T. D. Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lamongan.

³¹ Moeljanto, S. E., KP, M., Retno Mawarini, S., SH, M., & Mashari, S. H. (2026). *Dekonstruksi Demokrasi Lokal: Mewujudkan Good Governance di Indonesia*. Penerbit Lawwana.

Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu terus memperkuat mekanisme partisipasi publik, meningkatkan transparansi informasi, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat agar tercipta demokrasi lokal yang lebih substantif dan berkelanjutan. Dengan demikian, kualitas kebijakan publik dapat semakin meningkat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif serta memperkuat legitimasi pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, A. S. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN PROSTITUSI: Studi Kasus di Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. *The Republic: Journal of Constitutional Law*, 1(2), 63-76.
- Bintang, R., & Sa'diyin, M. (2026). PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA DESA DI DESA BULUBRANGSI KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH. *The Republic: Journal of Constitutional Law*, 4(1), 85-112.
- Farhanuddin, A. F., Setia, A. A. P., & Jauza, D. (2021). Penerapan etika pelayanan publik dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 64-74.
- Firdausijah, R. T., & Priatna, A. (2020). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Kebijakan: *Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(2), 58-63.
- Irianto, H., Prasetijowati, T., & Miladiyah, R. (2020). PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PENYUSUNAN APBDESDI DESA MERTANI KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN. *Intelektual: Jurnal Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 10(1), 98-109.
- Kasmawanto, Z. (2025). Dinamika Konflik Politik di Desa: Proses dan Dampaknya terhadap Tata Kelola Pemerintahan. *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 17(1), 240-253.
- Lubis, S. (2017). Partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. *Demokrasi*, 6(1), 242733.
- Magriasti, L. (2011). Arti penting partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik di daerah: analisis dengan teori Sistem David Easton.
- Marsh, D., & Stoker, G. (2019). Teori dan metode dalam ilmu politik. Nusamedia.

- Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *Jurnal ilmu politik dan komunikasi*, 6(1).
- Moeljanto, S. E., KP, M., Retno Mawarini, S., SH, M., & Mashari, S. H. (2026). *Dekonstruksi Demokrasi Lokal: Mewujudkan Good Governance di Indonesia*. Penerbit Lawwana.
- Nelly, S. (2024). Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik. *Jurnal Sociopolitico*, 6(1), 86-94.
- Nugraha, T. D. Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lamongan.
- Ogsala, N., Ma'ruf, M. F., Pradana, G. W., & Eprilianto, D. F. (2026). Analisis Penerapan Good Governance Melalui Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif Berbasis Komunitas Pada Pilkada 2024 Di Kabupaten Lamongan (Studi Kasus: Komunitas Disabilitas). *Publika*, 14(1), 165-178.
- Raharja, M. (2015). *Pengelolaan keuangan dan aset daerah (studi pada badan pengelolaan Keuangan dan aset daerah, kabupaten lamongan)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Sagena, U., Lawelai, H., & Dema, H. (2023). *Metode Penelitian Sub Rumpun Ilmu Politik (Teori & Referensi berbasis Studi Kasus)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Saputri, E. D. (2018). Analisis Pelayanan Publik Pemerintahan Desa Tlanak Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(1).
- Sholikin, A. (2021). Implementation of Green and Clean Policies in Environmental Governance Perspective in Lamongan Regency. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 18(1), 104-117.
- Sihotang, J. S. (2023). Good governance dalam pelayanan publik. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 1(2), 188-201.
- Sururi, A. (2019). Inovasi kebijakan organisasi sektor publik menuju terwujudnya good public policy governance. *Jurnal Good Governance*, 15(1).
- Susilo, J. H. (2016). *Pengelolaan alokasi dana desa (ADD) untuk mewujudkan good governance: Studi kasus pada Desa Banggle Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Ulum, S., & Dewi, S. A. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Gamplong. *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 14-24.

- Utomo, S. D. (2003). Partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan. dalam Indra J. Piliang, Dendi Ramdani, dan Agung Pribadi, Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi, Jakarta: Penerbit Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa.
- Wahyuni, S., & Sudirman, R. (2026). Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik: Memperkuat Demokrasi dan Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah. Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora, 4(4), 2196-2206.
- Yasin, Andi Sri Yusnani, et al. "Analisis Kebijakan Publik Dan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance." Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi 17.2 (2024): 410-418.
- Yin, R. K., & Mudzakir, M. D. (2019). Studi kasus desain & metode.